

Anggaran Honor di Pilkada 2020 Paling Besar



<https://redkal.com/anggaran-honor-di-pilkada-2020-paling-besar/>

Honor penyelenggara ad hoc Pemilihan Umum (Pemilu) biasanya menjadi salah satu pos penggunaan anggaran dana besar dalam penyelenggaraan Pemilu. Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020, pos ini juga diperkirakan menjadi pos pengeluaran yang paling besar dibanding pos pengeluaran lainnya. Hal ini pula yang akan menjadi salah satu pokok bahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel menyambut Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2020.

Pasalnya, dalam Pilkada Kalsel 2020 beban anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel. Dijelaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H Suripno Sumas, dalam pembahasan nantinya komponen tersebut akan di evaluasi. Hasil penyelenggaraan Pemilu 2019 juga tentu menjadi salah satu bahan evaluasi terkait honor penyelenggara ad hoc.

Namun tak seperti Pemilu 2019 yang gabungan Pemilihan Presiden dan Wakilnya serta Pemilihan Legislatif tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, Pilkada 2020 hanya memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta beberapa kabupaten/kota.

Ini juga sudah disinergikan dengan kabupaten/kota jadi beban kerja tidak akan seberat Pemilu 2019, saya kira nanti honor akan dilihat bobot kerja. Kalau diperhitungkan berat akan dipertimbangkan usulkan penambahan honor, tapi kalau bobot kerjanya tidak terlalu berat nilai

honor saya kira sementara sudah dianggap wajar," kata H Suripno. Namun secara umum, Dewan menurut H Suripno mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kalsel yang diusulkan memakan dana Rp 210 miliar untuk keperluan penyelenggaraannya.

Pencadangan dana untuk alokasi Pilkada 2020 yang dilakukan bertahap mulai Tahun Anggaran (TA) 2019 dan dilanjutkan TA 2020 menurutnya masuk akal. Hal ini menurutnya dilakukan agar tak terlalu memberatkan APBD dalam satu TA sehingga tak berpotensi mengganggu keperluan penyelenggaraan Pemerintahan lainnya. Sebelumnya menurut Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji, pos pengeluaran tersebut memang menjadi pengeluaran terbesar dan bisa memakan enam puluh persen bahkan lebih dari total anggaran.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Pos Anggaran Honor Penyelenggara Ad Hoc Pilkada 2020 Akan Dievaluasi Sesuai Bobot Kerja Selasa, 31 Desember 2019.
2. <https://redkal.com>, Anggaran Honor di Pilkada 2020 Paling Besar, Selasa, 31 Desember 2019.

Catatan:

✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.